MODEL PEMBELAJARAN LITERASI BUDAYA KEWARGANEGARAAN

DALAM PPKN BERBASIS TRADISI LOKAL NUSANTARA DI SEKOLAH DASAR

Oleh:

Dr. H. Solihin Ichas Hamid, M.Pd.

Dra. Hj. Tuti Istianti, M.Pd.

Fauzi Abdillah, M.Pd.

**Model Pembelajaran
LITERASI BUDAYA KEWARGANEGARAAN
DALAM PPKn BERBASIS TRADISI LOKAL
NUSANTARA
DI SEKOLAH DASAR**

**Dr.H. S. Ichas Hamid, M. Pd
Dra.Hj.Tuti Istianti, M.Pd.
Fauzi Abdillah, S.Pd.M.Pd.**

**Universitas Pendidikan Indonesia
Kampus Cibiru
2017**

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt., karena atas izin dan ridho-Nya, akhirnya penelitian ini dapat dilaksanakan dan telah diproduksi model purwarupa. Model purwarupa ini dikembangkan dari penelitian yang berjudul “Pengembangan Model Literasi Budaya Kewarganegaraan pada PPKn Berbasis Budaya Lokal Nusantara”. Model Purwarupa ini dikonstruksikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas diperolehnya Program Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi yang dibiayai oleh BOPTN Dikti Tahun Anggaran 2017.

Penulis menyadari bahwa laporan kemajuan penelitian tidak akan terwujud tanpa bantuan dan berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung yang telah memberi kepercayaan kepada penulis untuk melaksanakan hibah penelitian ini; .
2. Direktur dan Sekretaris UPI Kampus Cibiru yang telah memberi dorongan dan semangat untuk melaksanakan penelitian ini;
3. Ketua Program Studi PGSD UPI Kampus Cibiru yang telah memberi motivasi dan berbagai bantuan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini;

4. Bapak dan Ibu Dosen UPI Kampus Cibiru selaku rekan sejawat yang telah turut memberikan masukan demi lancarnya penelitian yang penulis laksanakan;
5. Para mahasiswa semester 8 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, UPI Kampus Cibiru yang telah terlibat dalam pelaksanaan;
6. Para partisipan di lokasi penelitian yang telah menjadi subjek penelitian hingga penelitian lapangan telah selesai dilaksanakan; dan
7. semua pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan penelitian yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga amal baik Bapak, Ibu, Saudara mendapatkan balasan dari Allah swt. Amin.

Penulis menyadari bahwa laporan kemajuan penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan banyak kelemahan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan agar penyelesaian penelitian dan penyusunan laporan penelitian ini akan lebih baik dan terarah. Amin.

Latar Belakang Konstruksi Model

Keanekaragaman budaya dan etnik pada sebuah negara mempunyai dua sisi yang dilematik, di satu sisi menjadi kekayaan sosial budaya yang jika berhasil dibangun dengan konstruksi yang komunikatif antar budaya (Tilaar, 2012; Goering, 2013) dan di sisi lain bisa berdampak negatif bagi kohesi sosial dan kualitas performa pemerintahan. (Hlepas, 2013). Performa institusional itu juga berhubungan serta menyangkut dengan faktor kebiasaan-kebiasaan seperti budaya politik, yang di dalamnya termasuk tradisi dan jalur ketergantungan satu sama lain. (Arikan, 2011).

Kehidupan bernegara dalam konteks nasional telah menjadi prestasi historis bangsa sejak berakhirnya kolonialisasi asing saat memasuki pertengahan abad 20. Dan sebagai anak bangsa yang mewarisi kekayaan geo-strategis dan kultural tidak kecil, dan jika jauh panjang ke menengok ke masa silam, anak bangsa ini tidaklah baru dilahirkan sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945. Berkaitan dengan geo-strategis dan kekayaan kultural yang dimiliki bangsa Indonesia itu, Dumbrava (2012) menggunakan istilah Ethno-cultural untuk mengacu pada komunitas politik di mana etnisitas dan budaya dimengerti sebagai sebuah hal kompleks yang terbentuk oleh bahasa, sejarah, budaya, dll seperti pada realitas bangsa dan wilayah Indonesia ini.

Mengacu pada hal itu, maka perlu adanya penyadaran bahwa bangsa dilahirkan oleh sejarah yang panjang. Rangkaian panjang tersebut bisa disambungkan dengan konsep Koalisi antar Sub-Budaya (Tilaar, 2012),

yakni di mana dengan menerapkan prinsip demokrasi seperti mengenal, menghargai dan mengadopsi nilai-nilai budaya etnis lainnya, sehingga kebudayaan sebuah bangsa bisa berkembang.

Pilihan menjadi satu bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah perkembangan demokrasi politik dan perjuangan hak-hak asasi manusia sedunia, menjadi pertanda bahwa secara konseptual bangsa ini telah menemukan jati-dirinya atas proyeksi kemajuan yang ingin dicapai melalui pendirian dan penyatuan negara bangsa – sebagaimana termaktub dalam mukadimah konstitusinya. Dari hal tersebutlah berangkat paradigma bahwa memfasilitas warga untuk memilih untuk dirinya sendiri, mana yang dihitung sebagai budaya dan bagaimana hal itu bisa membantu mereka mengenali siapakah mereka. (Chaney, 2002) Untuk itu, pencarian dan penelusuran atas tanda-tanda kehidupan dan kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah berlangsung sejak masa awal bangsa ini menemukan kemapanan kulturalnya di tengah pergaulan bangsa-bangsa lain di dunia penting untuk dilakukan.

Cultural Citizenship atau Budaya Kewarganegaraan secara eksplisit merupakan sebuah konstruksi kompleks dari upaya bahasa, metafora dan sistem simbolik yang memperkuat warga negara untuk berpartisipasi dan terlibat proses politik yang lebih luas. (Stevenson, *Cosmopolitan Education and Cultural Citizenship: A Critical European Perspective*, 2012). Keterlibatan tersebut memandang individu sebagai subyek penuh dari negara yang terdidik bukan sekedar legal dan politis, juga dari sisi sosial dan kultural. (Lee, 2013). Jadi, perhatian Budaya Kewarganegaraan ada pada

pengelolaan dan pengembangan garis keturunan budaya melalui pendidikan, kebiasaan, bahasa dan kepercayaan (Miller, 2002). Sedangkan secara terbatas dari sisi sosio-politis, Budaya Kewarganegaraan merupakan kondisi kebersamaan dan akses pada hak kultural yang terkonstruksi sebagai identitas nasional dan kultural khususnya bagi seorang imigran (Horsti & Pellander, 2015), karena kewarganegaraan berbasis budaya lebih dapat diterima ketimbang kewarganegaraan berbasis etnis khususnya bagi para imigran (Reijerse, Acker, Vanbeselaere, Phalet, & Duriez, 2012). Bahkan lebih dari itu, Budaya Kewarganegaraan juga dapat digunakan sebagai konten serta esensi dalam media satir politik yang memfasilitasi transformasi sosial dan politik, contohnya seperti yang terjadi di Maroko. (Marzouki, 2015).

Koherensi antara Budaya Kewarganegaraan yang bersumber dari jejak historis kultural suku bangsa di Indonesia dan praktik pendidikan penting untuk dirangkai. Merangkainya dengan mengenali diri sendiri dan mengenal orang lain dapat ditempuh dengan pendidikan multikultural atau alternatifnya yakni pendidikan interkultural yang keduanya memang terintegrasi dengan PKn. (Sandu, 2015; O'Cinneide, 2012; Lentin & Titley, 2011). Perubahan sikap terhadap orientasi akulturasi dan stereotype pun mengalami perubahan melalui proses pendidikan (Sandu, 2015; Jivan, Rus, & Bota, 2002), secara terbatas pada etnik kultural sunda, telah ditunjukkan aktualitas kompleksnya sebagai model pendidikan dan pembelajaran sosial kultural (Hamid, 2015), dengan begitu pendidikan dan budaya kewarganegaraan patut ditelusuri untuk menjelaskan dan menciptakan kondisi kemenegaraan

seorang warga negara yang berdasarkan kontekstualitas geo-historis Nusantara.

Bahwa persoalan kewarganegaraan sebagaimana berlangsung di berbagai negara, termasuk di tanah air menunjukkan perspektif yang luas dan kompleks, yang membuka peluang untuk dilakukan kajian secara komprehensif dari berbagai sudut pandang baik teoritis dan praktis melingkup berbagai aspek kehidupan masyarakat, yang garis besarnya dapat diklasifikasi : Pertama, terkait dengan status dan hak sipil meliputi aktualisasi politik itu sendiri, perspektif ekonomi, dan problematika sosial mendasar sebagai warga negara; Kedua, dilihat berdasar bentuk dan asal-usulnya mulai sebagai warisan purba, memasuki perkembangan modern hingga post-modern; Ketiga, kaitan dengan fragmentarisme dan implementasi ideologi seperti liberalisme, republikanisme, komunitarianisme; Keempat, ujud keseluruhannya sebagai aktualisasi dan produk satuan budaya hingga keragaman bentuk yang mengikat dan menyatukannya, yakni cultural dan multicultural citizenship.

Kepentingan studi ini secara jangka panjang, mencoba melihat persoalan pencapaian tujuan pengembangan pendidikan kewarganegaraan, tidak saja secara konseptual- normatif, tetapi lebih dari itu terwujud menjadi realitas yang hidup dalam bentuk semangat (spirit) atau sekurang-kurangnya sebagai refleksi kesadaran (awareness) baik secara personal dan kolektif di dalam kesatuan masyarakat (komunitas). Karena itu, pendekatan kultural menjadi pilihan – bukan terutama dimaksudkan melantunkan etnisisme-lokal yang tidak perlu. Tetapi mencari spirit kultural sebagai dasar bagi

pengembangan perilaku kolektif manusia di dalam masyarakat atas nama pendidikan, yang tidak bisa ‘tidak’ meminjam akar dari mana pola atau system kebudayaan itu dilahirkan. Bahwa semua bangsa di dunia ini, dengan tingkat peradaban dan segala kebudayaan yang dimilikinya dimulai dari pembentukan entitas dan identitas pada satuan etnik, dan meski setiap etnik memiliki cirinya sendiri tiadalah yang membungkus diri untuk hanya menjadi dirinya sendiri, melainkan terbuka menjadi bagian dalam kebersamaan dan kemajuan baik secara nasional, regional dan global.

Berkaitan dengan hal tersebut, secara strategis penelitian ini dinaungi oleh payung penelitian Universitas Pendidikan Indonesia yang mempunyai tujuan untuk memperkokoh jati diri UPI sebagai lembaga pendidikan profesional guru dan pendidik, dan salah satu di antaranya ialah Penelitian untuk Pengembangan Pendidikan dengan fokus pada tema Literasi Politik, Hukum, dan Perkembangan Masyarakat. Maka, penelitian akan menjelajahi dan menciptakan sebuah skema serta model dalam pendidikan di sekolah dasar berbasis kontekstualitas budaya kewarganegaraan nusantara, khususnya pada mata PPKn.

Model Purwarupa Literasi Budaya Kewarganegaraan

A. Orientasi Model Pembelajaran Literasi Budaya Kewarganegaraan

Desain ini berangkat dari paradigma konstruktivisme, yang berpandangan bahwa pengetahuan adalah non-objective, bersifat temporer, selalu berubah, dan tidak menentu, serta pembelajaran kontekstual yang holistik (Johnson, 2002). Belajar dilihat sebagai penyusunan pengetahuan dari pengalaman kongkret, aktivitas kolaboratif, dan refleksi serta interpretasi. (Brooks & Brooks, 1993). Dalam kaitannya dengan aktivitas belajar, terdapat kondisi yang melibatkan penguasaan dan pengubahan pengetahuan, keterampilan, strategi, keyakinan, sikap, dan perilaku. (Schunk, 2012).

Selain itu, desain model ini juga berorientasi pada kompetensi (*competency based curriculum*) yang mempunyai tujuan agar warga negara lebih mandiri dalam memahami dan mencari solusi terhadap masalah. Pendekatan ini mengacu pada pembaruan metode pembelajaran yang digagas oleh Filsuf Pendidikan John Dewey yang dengan tegas mendeklarasikan “*I believe that the question of method is ultimately reducible to the question of the order development of the child’s powers and interests*”. (Dewey, 1987)

Ada pun pengembangan Model Literasi Budaya Kewarganegaraan berdasarkan pada konsep di bawah ini:

Bagan 1. Konsep Fondasional dari Pengembangan PKn Berbasis Literasi Budaya (Hamid, 2015)

Dari konsep fondasional di atas, hubungan tematik proses kurikulum pembelajaran literasi budaya kewarganegaraan berbasis kearifan lokal di tengah

masyarakat kemudian dapat diperagakan dalam visualisasi di bawah ini:

Bagan 2. Hubungan Konseptual Materi Kurikuler dan Pendekatan Literasi Budaya Kewarganegaraan dalam masyarakat

Dari kedua bagan sebelumnya, maka dikembangkanlah Model Purwarupa untuk Literasi Budaya Kewarganegaraan. Dengan berangkat dari paradigma bahwa terdapat masyarakat adat yang terdiri dari sejumlah

suku-bangsa di kepulauan Nusantara, dari ujung utara pulau Sumatera di bagian barat hingga titik selatan tanah Papua di timur dalam kesatuan geografis-demografis, dan kultural nasional Indonesia, adalah pemelihara, pewaris nilai-nilai luhur anak bangsa Bhinneka Tunggal Ika, di dalam bangun dasar sebagai sub-kultur nasional Indonesia yang dapat digambarkan melalui dari sudut elementer, meliputi: 1). Bahasa dan Organisasi Kekuasaan, 2). Hukum dan Keamanan, 3). Pendidikan dan Sumber mata-pencapaian, 4). Ritual-Kepercayaan, 5). Kesenian dan Aktualisasi pemeliharaannya. Oleh karena itu, dengan pendekatan etnopedagogi dikembangkanlah model purwarupa Literasi Budaya Kewarganegaraan dengan sintaks berikut:

1. Identifikasi Nilai Moral Kewarganegaraan

Pada tahap pertama ini kegiatannya adalah menemukan muatan konsep Nilai Moral Kewarganegaraan (NMK) sebagai *ethos citizenship* yang secara potensial terdapat dalam kehidupan kultural masyarakat adat Nusantara, untuk kemudian mengangkatnya bagi kepentingan praksis pengembangan literasi budaya kewarganegaraan melalui proses kurikulum di persekolahan. Dengan melakukan inventarisasi dan kodifikasi sejumlah ungkapan yang mewakili entografis dari masing-masing kultur dan tradisi wilayah setempat secara kontekstual.

2. Klasifikasi Ungkapan

Pada tahap ini, ungkapan-ungkapan verbal yang merupakan onsep dan aktualisasi ajaran Nilai Moral bagi masyarakat adat pada semua suku bangsa di Nusantara,

dapat ditelusur dari mulai dari ungkapan peribahasa, yang merupakan salah-satu penanda seni budaya dasar karena bersifat tuturan (*verbal*) atau disebut juga sebagai sastra lisan (*oral*), jika dilihat dari keindahan bunyi kata merupakan karya seni sastra kolektif masyarakat adat setempat sebagai pendukungnya. Kemudian klasifikasi ini dilakukan dalam kerangka NMK yang dilakukan pada tahap pertama.

3. Verifikasi Ungkapan

Pada tahap ini dilakukan verifikasi terhadap kodifikasi dan klasifikasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Di sini ungkapan verbal diramu berdasarkan masing-masing NMK dengan sampling dari suku atau adat yang ada, lalu diartikan serta dipahami makna dari masing-masing makna tersebut.

4. Pengorganisasian Muatan Nilai Idiom Lokal

Pada tahap ini dilakukan pengorganisasian muatan nilai Idiom lokal, berdasar hasil analisis kategorisasi 7 Nilai Moral Kewarganegaraan (NMK) terhadap sejumlah nilai dalam idiom lokal. Penyusunan / perumusan konsep material yang secara verbal telah diidentifikasi sebagai acuan nilai-moral lokal ke dalam pengorganisasian bahan pengembangan kurikulum sekolah, yakni mata pelajaran PPKn berdasar kurikulum yang berlaku, yaitu kurikulum nasional.

5. Pengembangan Literasi Budaya

Tahap ini dilaksanakan dalam dua tuntutan esensial model Literasi Budaya Kewarganegaraan ini, yaitu: (1). Sesuai dengan urgensi pengembangan toleransi-

keberagaman (*Bhineka Tunggal Ika*) nilai-nilai parsial yang dapat diintroduksi ke dalamnya meliputi, nilai-nilai yang merepresentasikan koeksistensi sifat dan sikap menerima (*to Give*) sebagai wujud kebesaran diri / keluhuran jiwa yang terdapat dalam NMK-1: rendah-hati, tahu-diri; NMK-2 : sabar, ikhlas, besar-hati, jujur, terbuka; NMK-3: bersahabat, setiakawan; dan NMK-4: santun / hormat, taat hukum, siap-siaga, waspada; dan (2). Sesuai dengan urgensi pengembangan Jati-diri bangsa, nilai-nilai parsial yang dapat diintroduksi ke dalamnya meliputi, nilai-nilai yang merepresentasikan kemampuan memberi (*to take*) koeksistensi kekuatan membangun diri yang terdapat dalam NMK-5: cerdas, cermat, berani, perwira; NMK-6: ulet, ajeg, kerja-keras, tangguh; dan NMK-7: adil, arif-bijaksana, pengayom.

6. Analisis Substansi Materi PKn

Tahap akhir ini adalah pengintegrasian dari tahapan-tahapan sebelumnya pada kebutuhan dan substansi serta materi PKn dalam konteks kurikulum 2013. Tahap ini perlu dibuat matriks yang terdiri dari ruang lingkup materi yang berisi materi-materi wajib PKn, dan secara khusus dielaborasi sesuai dengan tingkatan kelaskelas rendah dan kelas tinggi. Bagian ini yang menjadi modal literasi karena struktur dan materi yang sudah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan literasi budaya kewarganegaraan didiseminasikan dengan analisis substansi materi PKn yang dimaksudkan secara operasional.

Ada pun sintak ini dapat digambarkan pada **Bagan 6** di bawah.

Bagan 3. Sintaks Model Purwarupa Literasi Budaya Kewarganegaraan

Implementasi Model, Prinsip Reaksi, dan Sistem Lingkungan Model Literasi Budaya Kewarganegaraan

1. Implementasi Model

Berdasarkan implementasi yang dilakukan, pelaksanaan atau penerapan model pembelajaran Literasi Budaya Kewarganegaraan ini dalam proses pembelajaran PPKn Sekolah Dasar di dalam kelas membutuhkan waktu 300 menit yang berlangsung dalam 2 pertemuan dan proses pembimbingan dilakukan selama satu minggu yang merupakan jeda dari pertemuan pertama dan kedua.

2. Prinsip Reaksi

Pada prinsipnya ada empat hal utama reaksi guru/dosen yang harus muncul dalam model pembelajaran Literasi Budaya Kewarganegaraan yakni membimbing, mengontrol kualitas materi, memberikan *feedback*, dan mengakomodasi kegiatan perkuliahan. Hal tersebut diperlukan dengan tujuan agar dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan produktif; membiasakan siswa bekerja secara kooperatif, kolaboratif, dan komunikatif; dan menjembatani siswa untuk melek terhadap berbagai hal baik terhadap informasi, teknologi, bidang ilmu yang dipelajari, maupun karakter, tata nilai, dan moral.

3. Sistem Lingkungan Model Pembelajaran

Guna menerapkan model ini, sistem lingkungan belajar yang diharapkan tersedia adalah lingkungan yang konstruktif, akomodatif, kritis, segar dan dinamis. Kelas yang dipenuhi dialog dan

akomodatif dalam memenuhi kebutuhan mahasiswa tentu sangat memiliki dampak besar, mengingat dalam Literasi Budaya Kewargaanegaraan, peran pengajar dan siswa berperan sangat besar dalam membangun iklim kondusif dan konstruktif edukatif, yang merupakan lingkungan belajar yang ideal bagi keterlaksanaan model pembelajaran ini. Dalam model pembelajaran ini, denah tempat duduk di kelas, desain interaksi dan pakaian siswa dibuat kontekstual dan sekondusif mungkin dengan menyesuaikan materi yang akan dibawa oleh para pembelajar.

4. Tujuan Pembelajaran dan Tujuan Penyerta Model Pembelajaran Literasi Budaya Kewargaanegaraan

Urgensi mempersiapkan siswa yang mendapatkan pengetahuan, keahlian dan kebijaksanaan yang mencukupi untuk menghadapi tantangan abad 21 tentu mendesak. Mengingat kurikulum 2013 menuntut guru dan siswa dapat melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual, saintifik, *inquiry*, *discovery* dan berbasis pemecahan masalah.

Dalam konteks PKn, tentu hal tersebut sangat bertalian erat, karena secara ontologis terdapat dua unsur pada perspektif PKn sebagai domain kurikuler, yakni *curriculum content* dan *student behavior*. (Wahab & Sapriya, 2011). Keduanya bisa dicapai dengan pendekatan-pendekatan yang terdapat pada kurikulum 2013.

Guru juga dituntut untuk optimal dalam hal operasional dan penguasaan konseptual-teoretik material PKn SD. Dengan memahami bahwa terdapat karakteristik-karakteristik PKn di SD yang perlu

diperhatikan, karakteristik tersebut terdiri dari *Civic Literacy*, *Citizenship Socio-cultural Communication*, *Citizenship Problem Solving*, *Citizenship Reasoning*, dan *Citizenship Participation*. (Winataputra, 2010). Tentu dengan pemahaman yang cukup, pengejewantahan konsep dasar PKn tersebut dapat dilakukan secara efektif.

Karakteristik dan tujuan PKn yang beraroma demokrasi tersebut tentu perlu diupayakan dan disebarkan melalui cara demokratis. John Dewey memperkuat serta mengakomodasinya melalui langkah-langkah berpikir ilmiah dalam buku “How We Think” (1990) sebagai berikut:

1. *A Feeling of perplexity*
2. *The Definition of the problem*
3. *Suggesting and testing hypotheses*
4. *Development of the solution, by reasoning, and*
5. *Testing of the conclusion followed by reconsideration if necessary.*

Langkah-langkah di atas kemudian dimodifikasi oleh Metcalf & Hunt (1955) sebagai metode berpikir ilmiah dan Banks (1990) dengan menyebutnya metode inkuiri sosial. (Wahab & Sapriya, 2011).

Keterampilan profesional dan pemahaman konseptual mengenai PKn di SD tentu menjadi konsekuensi dan hal yang perlu dikuasai oleh para guru SD. Guru harus dapat melibatkan dirinya dengan murid atau dengan istilah Meira & Theisen-Homer (2015) “*Teachers and students are mutual allies, not antagonistic claimants*”. Maka menciptakan kelas yang kontekstual berdasarkan tradisi lokal, demokratis dan dapat mencapai tujuan PKn menjadi PR bersama

lembaga pendidikan yang menelurkan calon warga negara kompeten dalam penguasaan konten materi dan prosedur pelajaran PKn di kelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikan, G. (2011). Economic Individualism and Government Spending. *World Values Research*, 4(3), 73-95.
- Chaney, D. (2002). Cosmopolitan Art and Cultural Citizenship. *Theory, Culture & Society*, 19(1-2), 157-174.
- Christina Wu, J. (2012). Cultural Citizenship at the Intersection of Television and New Media. *Television & New Media*, 14(5), 402-420. doi:10.1177/1527476412446089
- Dewey, J. (1987). *My Pedagogic Creed*. Diambil kembali dari <http://www.infed.org/theinformaleducationarchives.html>
- Dumbrava, C. (2012). *Nationality, Citizenship and Ethno-Cultural Membership. Preferential Admission Policies of EU Countries. (Thesis)*. Florence: European University Institute. doi:10.2870/72944
- Goering, E. (2013). Engaging Citizens: A Cross Cultural Comparison of Youth Definitions of Engaged Citizenship. *Universal Journal of Educational Research*, 1(3), 175-184. doi:10.13189/ujer.2013.010306
- Hamid, S. I. (2012). Rekonstruksi Nilai Moral Kewarganegaraan Berdasar Analisis Semantik

- Terhadap Ungkapan Kultural Masyarakat Sunda. *Cakrawala Dini*, 3(2).
- Hamid, S. I. (2015). *Nilai Moral Kewarganegaraan Dalam Artefak Kehidupan Sosial Kultural Masyarakat Sunda: Studi Eksploratif Nilai Moral Kewarganegaraan dalam Ungkapan, Artikulasi Seni dan Ritual Adat Budaya Sunda. (Disertasi)*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Hamid, S. I. (2015). *Semiotika Pendidikan Kewarganegaraan dalam Tradisi Lokal Sunda*. Bandung: Rizqi Press.
- Hlepas, N. (2013). *Cultural Diversity and National Performance*. Athens, Greece: International Centre for Black Sea Studies (ICBSS).
- Horsti, K., & Pellander, S. (2015). Conditions of cultural citizenship: intersections of gender, race and age in public debates on family migration. *Citizenship Studies*, 1-14. doi:10.1080/13621025.2015.1008998
- Jivan, A., Rus, C., & Bota, O. (2002). *Roma and Gadge in Periam and Satchinez*. Timisoara, Romania: Intercultural Institute of Timisoara.
- Johnson, E. B. (2002). Contextual teaching and learning: What it is and why it's here to stay. Corwin Press.
- Kapai, P. (2012). Developing Capacities for Inclusive Citizenship in Multicultural Societies: The Role of Deliberative Theory and Citizenship Education. *Public Organiz Rev*, 277–298.
- Lee, T. (2013). *Public Culture and Cultural Citizenship at the Thessaloniki International Film Festival. (Doctoral dissertation)*. Cambridge,

- Massachusetts: Harvard University. Diambil kembali dari <http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:11181137>
- Lentin, A., & Titley, G. (2011). *The crises of multiculturalism: Racism in a neoliberal age*. London, England: Zed Books.
- Man, K. (2013). *Citizenship education in post-1997 Hong Kong: civic education or nationalistic education? (Master's thesis)*. Hongkong: Lingnan University. doi:http://dx.doi.org/10.14793/soc_etd.35
- Marzouki, M. E. (2015). Satire as counter discourse: Dissent, cultural citizenship, and youth culture in Morocco. *the International Communication Gazette*, 77(3), 282-296. doi:[10.1177/1748048514568762](https://doi.org/10.1177/1748048514568762)
- Miller, T. (2002). Cultural Citizenship. Dalam E. F. Isin, & B. S. Turner, *Handbook of Citizenship Studies* (hal. 231-244). London: Sage Publications Ltd.
- O'Cinneide, C. (2012). Citizenship and Multiculturalism: Rethinking Equality, Rights and Diversity in Contemporary Europe. Dalam Y. Ohana, & H. Otten (Penyunt.), *Where do you stand? Intercultural learning and political education in contemporary Europe* (hal. 69-74). Berlin, Germany: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Plant, E., & Devine, P. (2009). The active control of prejudice: Unpacking the intentions guiding control efforts. *Journal of Personality and Social Psychology*, 640-652.
- Reijerse, A., Acker, K., Vanbeselaere, N., Phaet, K., & Duriez, B. (2012). Beyond the Ethnic-Civic Dichotomy: Cultural Citizenship as a New Way of

- Excluding Immigrants_pops_920. *Political Psychology*, 20(20), 1-20. doi:10.1111/j.1467-9221.2012.00920.x
- Sandu, O. N. (2015). Civic and Intercultural Education: A Means for Community Development and Attitude Change. *SAGE Open*, 1-6. doi:10.1177/2158244015580371
- Stevenson, N. (2010). Education, neoliberalism and cultural citizenship: Living in 'X Factor' Britain. *European Journal of Cultural Studies*, 13(3), 341–358. doi:10.1177/1367549410363201
- Stevenson, N. (2012). Cosmopolitan Education and Cultural Citizenship: A Critical European Perspective. *Cultural Sociology*, 6(1), 113-128. doi:10.1177/1749975511401281
- Tilaar, H. (2012). *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.